

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2005. *Menguak Tabir Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Phinatama Media. Makassar.
- Christine.S.T Kansil. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- , 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Malang.
- Faisal Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Rangkang Education Yogyakarta & PUKP-Indonesia. Yogyakarta.
- HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Pesada. Jakarta.
- , 2008. *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah & Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- , 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- I Nyoman Gede Remaja. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Singraja.
- M. Irfan Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Jakarta Selatan.

Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Philipus M Hadjon (dkk.). 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Pers. Yogyakarta.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Depok.

Ridwan. 2016 *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Perkara Korupsi*. FH Ull Press. Yogyakarta.

S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media. Bandung.

Yusri Munaf. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing. Pekanbaru.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik desa Bersama Wanua Tonra Lampiran II Anggaran dasar Badan Usaha Mlik Bersama Wanua Tonra

## **Jurnal**

- Budi Suhariyanto. 2018. "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor, Jurnal Hukum Dan Peradilan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 7 No.2
- Dedi Sudiman, Monalisa Ibrahim, Erfina. 2021. "Peranan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang". Jurnal Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Vol. 9 No. 2
- Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan". Jurnal Warta. Universitas Dharmawangsa. Vol. 13 No. 1
- Herman. 2015. "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara". Jurnal Komunikasi Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Vol. 1 No. 1.
- Hidayat Pratama Putra. 2020. "Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Vol. 3 No. 1.
- Indrawati, Mohammad Arfandi Adnan dan Mahyuddin Ibrahim. 2020. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha

Milih Desa (BUMDES) Di Desa Sulai”. Jurnal Pegguruang:Conference Series. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Al Asyariah Mandar. Vol. 2 No. 2

Lia Sartika Putri. 2016. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance Og Village Regulation). Jurnal Legislasi Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Vol. 13 No. 2

Luthvi Febryka Nola. 2016. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Negara Hukum. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 7 No. 1.

Muh. Zulfan Hakim *et.al.* 2020 “Institutional Strengthening and Management Of Village-Owned Enterprises To Improve The Welfare Of Village Communitas”, UNTAG Law Review (ULREV). Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Vol. 4 Issue. 2

Muh. Hasrul. 2017. “Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah kabupaten/kota Di Indonesia”, E-Journal Hukum, Kebijakan Dan Globalisasi Vol. 607 No.1

Naswar (dkk.). 2019. “Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa”. Jurnal Al-ishlah. Fakultas Hukum. Universitas Muslim Indonesia. Vol. 21 No. 2

Rohim. 2018. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”. Majalah Ilmiah Pelita Ilmu. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. STIA Pembangunan Jember. Vol. 1. No. 1

Tri Cahya Indra Permana. 2015. “Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Access To Justice (The Administrative Court After Government Adminitration Acts In Terms Of Acces To Justice)” Jurnal Hukum Dan Peradilan. PTUN Jakarta. Vol. 4 No. 3.

Zulkarnain Ridlwan. 2013. ” Payung Hukum Pembentukan BUMDes”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol. 7. No. 3

## **Skripsi**


- Andi Anisa Agung. 2014. "*Analisis Yuridis Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka Di Lingkungan Intansi Pemerintahan*". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Jusman Khairul Hadi. 2021. "*Kedudukan Bumdes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*." Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Gunung Rinjani Selong.
- Nabila Fitrianita. 2021. "*Pengeloalan Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*." Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Makassar
- Paratam Faradillah. 2017. "*Penyelesaiann Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Desa*". Tesis. Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar

#### **Internet**

- <https://kbbi.web.id/implikasi> Diakses Pada tanggal 21 April 2020 Pukul 16.11 WITA
- <https://kbbi.web.id/wewenang> Diakses Pada 12 Agustus 2022 Pukul 20.00 WITA

# LAMPIRAN

## 1.1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**KECAMATAN TONRA**  
**DESA BULU-BULU**  
*Alamat : Jln.Merdeka No.1Desa Bulu-Bulu Kec Tonra Kab.Bone*  
*Website : [www.desabulubulu.com](http://www.desabulubulu.com) email : [desabulubulu@gmail.com](mailto:desabulubulu@gmail.com)*

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : / DB / IX / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUH. ARIF, MM  
Jabatan : KEPALA DESA BULU-BULU  
Alamat : DUSUN KACCOPE DESA BULU BULU KEC. TONRA KAB. BONE

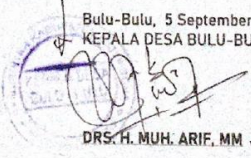
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA RAHMADANI  
Alamat : JLN. G. KINABALU, KEL. MACANANG  
KEC. TANETE RIATTANG BARAT KAB. BONE  
No. Pokok : B021181020  
No. HP : 082187239545  
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Bahwa Yang Bersangkutan Tersebut Diatas Benar Telah Melakukan Penelitian Sebagaimana Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum No. 6976/UN4.5.3/PT.00/2022 Tentang Penelitian yang ditujukan Kepada Pemerintah Desa Bulu-Bulu Untuk Mendapatkan Data / Informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

**\* TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN PELAKSANAAN OPERASIONAL  
BUMDESMA WANUA TONRA \***

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepadanya untuk digunakan Sebagaimana Mestinya .

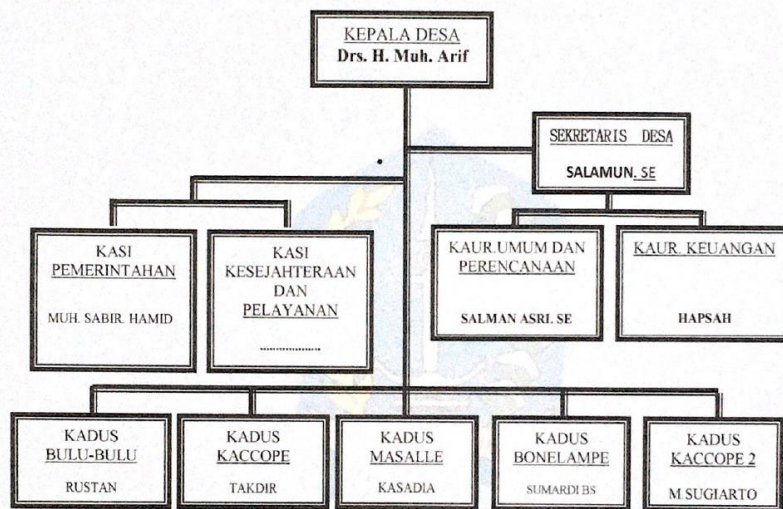
Bulu-Bulu, 5 September 2022  
KEPALA DESA BULU-BULU  
  
DRS. H. MUH. ARIF, MM

## 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa



### 2.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bulu-Bulu berdasarkan Peraturan Desa Bulu-Bulu Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Desa Bulu-Bulu adalah sebagai berikut :





### 1.3 Struktur Pengelola Badan Usaha Milik Desa Bersama Wanua Tonra

**Lampiran 1 :**

**PERATURAN BERSAMA**

KEPALA DESA RAPPAN Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA SAMAENRE Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA LIBURENG Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA PADATUO Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA BULU-BULU Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA GARECCING Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA BONEPUTE Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA BICCOING Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA MUARA Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA BACU Nomor 02 Tahun 2020,  
KEPALA DESA UJUNGE Nomor 02 Tahun 2020,

**TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BERSAMA WANUA TONRA**

Tanggal : 02 Januari 2020

**SUSUNAN PENGELOLA  
BUMDESA BERSAMA WANUA TONRA**

**Dewan Penasehat :**

Pembina : Camat Tonra  
Ketua : Drs. H. Muh. Arif  
Wakil Ketua : A. Kasasto SH  
Sekretaris : A. Darwin. SE  
Bendahara : Nahrawi Asaf  
Anggota : A. Muh. Arifin S.Pd  
Busra  
A. Sudarno, BA  
Najamuddin  
Ueman  
A. Irwan  
Zainuddin

**Badan Pengawas :**

Ketua : Akhmad. SE  
Sekretaris : A. Muh. Yusuf. SE  
Bendahara : Jasmania, S.Pd

**Pelaksana Operasional :**

Direktur Utama : Salamun. SE  
Bendahara : A. Muhtar  
Sekretaris : Sainab. S.Kom  
Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha Budidaya Kelor : .....

Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha Pembibitan Kelor : .....

Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha Tambak Bandeng : Sumardi Beddu Solo  
Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha Wisata Alam / Pantai : .....

Kepala Divisi Pengelola Unit Usaha Industri Masyarakat : .....

## 1.4 Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa



### KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU-BULU

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA

DESA BULU-BULU KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE

KEPALA DESA BULU-BULU,

- Menimbang :
- bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Sekretaris Desa;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bulu-Bulu dari Camat Tonra Nomor:36/TR/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

- Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Desa Bulu-Bulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Desa Bulu-Bulu ( Lembaran Desa Bulu-Bulu Tahun 2016 Nomor 3);
  13. Peraturan Desa Bulu-Bulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulu-Bulu Tahun 2017-2022;
  14. Peraturan Desa Bulu-Bulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bulu-Bulu Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Nama : **SALAMUN. SE**  
Tempat/Tgl Lahir : Togo, 5 Oktober 1984  
Alamat : Dusun Kacope Desa Bulu-Bulu

Sebagai **SEKRETARIS DESA** di Desa Bulu-Bulu Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.

KEDUA : Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

KETIGA : Sekretaris Desa Bulu-Bulu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

## 1.5 Berita Acara Musyawarah Antar Desa

**BADAN KERJA SAMA ANTARA DESA  
(BKAD)  
KECAMATAN TONRA  
KABUPATEN BONE**  
Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Desa Bulu-Bulu

3. Jumlah Penyertaan Modal Desa Per/ 31 Desember 2019

No	Desa	Jumlah	No	Desa	Jumlah
1	Rappa	Rp. 97.300.000	7	Bonepute	Rp.
2	Samaenre	Rp. 40.000.000	8	Biccoing	Rp.
3	Libureng	Rp. 10.000.000	9	Muara	Rp.
4	Padatuo	Rp. 10.000.000	10	Bacu	Rp. 20.000.000
5	Bulu-Bulu	Rp. 20.000.000	11	Ujunge	Rp.
6	Gareccing	Rp.			
Total Penyertaan Modal					Rp. 247.300.000

4. Terjadinya Perubahan Kepengurusan Pelaksana Operasional BUMDesa Bersama sebagai Berikut :

- Kepengurusan Lama 1. Ketua : **Sumardi Beddu Solo**
- 2. Sekretaris : **Sainab. S.Kom**
- 3. Bendahara : **A. Muhtar**

Setelah Musyawarah Forum Telah Menyepakati Adanya Perubahan Kepengurusan baru Sebagai berikut :

- Kepengurusan Baru 1. Ketua : **Salamun. SE**
- 2. Sekretaris : **Sainab. S.Kom**
- 3. Bendahara : **A. Muhtar**

Pelaksana Kepengurusan BUMDESma Wanua Tonra yang baru dinyatakan Berlaku sejak di tetapknya di Forum ini, untuk kemudian di **rekomendasikan melalui Keputusan Bersama Kepala Desa** dan juga sebagai Rujukan dalam **Pergantian Specimen Rekening BANK**

5. Rencana Kerja Kepengurusan BUMDESMA WANUA TONRA,

- ✓ Akan Mengembangkan Beberapa Unit Usaha Potensial
- ✓ Tetap Akan Melakukan Kerja Sama Dengan Pihak Lain baik dari PT, maupun dari Pihak Ketiga Lainnya]
- ✓ Rencana Kerja Pengurus Baru akan di paparkan di kesempatan lain untuk kemudian di sepakati Oleh Penyerta Modal untuk segera di laksanakan kegiatannya.